

## Efisiensi Tak Berlaku untuk Pendidikan dan Kesehatan



*SUMBER :KORANKALTIM KAMIS, 20/02/2025*

**SAMARINDA** – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengaku telah melakukan efisiensi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 20 persen, terhitung sejak 2025. Pernyataan itu datang dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Efisiensi anggaran ini dimulai sejak APBD Murni 2025 dan akan terus berlanjut. Bahkan efisiensi anggaran Pemkot Samarinda sudah dilakukan sebelum adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pria yang akrab disapa AH itu mengonfirmasi bahwa hanya pembangunan Teras Samarinda yang mungkin mengalami keterlambatan. "Salah satu di antaranya. Teras Samarinda semulanya di tahun ini kita rencanakan dua. Titik kedua dari sisi teras yang sudah ada menuju Pelabuhan Pelindo," kata AH. "Titik ketiga dari teras yang sudah ada menuju arah Teluk Lerong. Tetapi yang kita biayai hanya satu titik saja untuk tahun ini," lanjutnya.

Keputusan yang diambil, tahun ini Pemkot hanya melakukan pengerjaan untuk Teras Samarinda menuju Pelabuhan Pelindo hingga tuntas. Meski begitu, AH menegaskan bahwa Pemkot Samarinda akan tetap memprioritaskan penanggulangan banjir.

"Misalnya pembangunan kolam retensi di Pampang dan Sungai Siring. Tahun ini kita alokasikan anggaran kurang lebih Rp30 miliar," tegasnya.

Walaupun melakukan efisiensi anggaran, AH menegaskan belanja obat-obatan untuk Puskesmas yang ada di Samarinda tidak masuk *list*. Sebab, ada banyak warga Samarinda yang pasti membutuhkan obat-obatan. Sehingga tidak memungkinkan melakukan pemangkasan di sektor ini.

"Belanja obat-obat di Puskesmas itu penting. Sehingga kita pastikan untuk di Puskesmas itu cadangan obatnya selalu ada," jelasnya.

Menurut dia, program prioritas adalah yang benar-benar berhubungan dengan kepentingan masyarakat Kota Samarinda, termasuk sarana pendidikan. Saat ini diakui AH, Pemkot Samarinda tengah membiayai rehab sekolah. Salah satunya seperti sekolah yang ada di Batu Besaung, Samarinda Utara.

"Memang visi dan misi kita adalah pembangunan yang pro terhadap masyarakat. Tapi kita pastikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan terdampak," jelasnya. **(ai/ht/mm)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Efisiensi Tak Berlaku untuk Pendidikan dan Kesehatan, 20/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.



